

## **AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER GUNA MEMBANGUN KECERDASAN BERIDEOLOGI PESERTA DIDIK DI PERSEKOLAHAN**

**Hariyanti**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau

*e-mail* : [hariyanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:hariyanti@lecturer.unri.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan artikel guna mendeskripsikan gagasan pengaktualisasian nilai-nilai pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun kecerdasan berideologi peserta didik di persekolahan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature dengan menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian. Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Pancasila sebagai ideology negara, memberikan orientasi dan wawasan serta pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan. Kecerdasan berideologi diperlukan sehingga dapat menghayati, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideology yang menyenangkan dan mudah dicerna untuk peserta didik; (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.

**Kata Kunci** : nilai-nilai Pancasila, ekstrakurikuler, kecerdasan berideologi.

### **ABSTRACT**

*The purpose of writing the article is to describe the idea of actualizing Pancasila values through extracurricular activities to build the ideological intelligence of students in schools. Data collection was carried out through a literature study using theories relevant to the research theme. In Indonesia, shared values are expressed in Pancasila which is able to unite people in the midst of differences in culture, race, language, religion and political beliefs. Pancasila as the state ideology, provides orientation and insight as well as normative guidelines in all areas of life. Ideological intelligence is needed so that it can appreciate, internalize and apply Pancasila values in life. Ideological intelligence through education is manifested in Pancasila and Civic Education (PPKn) in schools. PPKn revitalization as ideological education can be realized in extracurricular activities under the coordination of PPKn teachers, with the advantages of (1) providing a fun and easy-to-digest ideological learning experience for students; (2) avoiding elements of indoctrination in learning; (3) involving all school members, carried out in the open because ideological intelligence cannot be fostered through rhetoric and symbols.*

**Keywords**: *Pancasila values, extracurricular, ideological intelligence*

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, menemukan landasan yuridisnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pedoman (*guding star*) dalam penyelenggaraan negara dalam semua lingkup kehidupannya. Selain itu, pancasila sekaligus juga berkedudukan sebagai ideologi negara. Ideologi adalah keseluruhan system ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian ideologi mengandung orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Menurut Soerjanto Poespowardojo (1992,46) dalam buku "*pancasila sebagai ideologi*" makna ideologi pancasila yakni sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan serta nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun kesadaran masyarakat akan ideologi bangsa itu bertingkat. Ini berarti bahwa kesadaran ideologi masyarakat berjalan dalam proses dan mengenal tahapan dalam intensitasnya. Hal ini tergantung pada bagaimana masyarakat mempersepsikan ideologi yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan dan *zeitgeist* masing-masing periode.

Secara historisitas, Nilai-nilai pancasila mampu menyatukan semua kebhinnekaan menjadi persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno (2009) Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Namun, disadari atau tidak, serta diakui atau tidak, pengamalan nilai-nilai pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.

Pancasila nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Permasalahan ini sudah barang tentu tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, artinya harus dicari upaya-upaya yang harus dilakukan untuk tetap melestarikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah bersama lembaga negara bukannya tidak mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, diantaranya (1) Program Empat pilar kebangsaan yang dikeluarkan oleh MPR, merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali geliat atau semangat untuk mengenali lebih dekat pilar-pilar kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan di kampus-kampus; (2) melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di lingkungan sekolah. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PPKn merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, sedangkan di lingkungan perguruan tinggi, PPKn dipecah menjadi 2 mata kuliah yang termasuk kelompok mata kuliah wajib umum yakni pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

Namun, keduanya dinilai kurang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai pancasila utamanya kepada para peserta didik sebagai warga negara, dan generasi bangsa. Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan lebih banyak ditujukan ke kampus-kampus sedangkan kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah cenderung diajarkan secara monolog dan lebih banyak bermuatan teoritis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai pancasila hanya dapat terinternalisasi, dipahami dan ditindaklanjuti dengan perbuatan oleh peserta didik jika mereka memahami melalui cara-cara yang menyenangkan, kreatif, dan jauh dari kesan indoktrinatif.

Sebagai ideologi negara, nilai-nilai pancasila harus dihayati dan diimplementasikan. Kecerdasan berideologi mutlak diperlukan oleh setiap warga negara dan hal tersebut dapat

terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Pancasila merupakan substansi utama dalam materi PPKn karena terkait dengan tujuan mata pelajaran ini yaitu membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai pancasila melalui kegiatan formal (di kelas) dan informal (di luar kelas). Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideology yang menyenangkan dan mudah dicerna untuk peserta didik; (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.

Prof Suwarna Al Muchtar (2016) merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah kecerdasan berideologi dalam bukunya “ideologi pancasila”. Beliau memperkenalkan beberapa strategi untuk peningkatan kecerdasan berideologi melalui revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi, pengembangan kurikulum dan kemampuan guru PPKn. Menurutnya sebagai aktualisasi ideologi, pancasila dewasa ini berada pada lingkungan global yang ditandai dengan persaingan ideologi besar dunia yang menyebabkan semakin rumit masalah-masalah sosial politik yang dihadapi negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi pemahaman warga negara melalui pendekatan pendidikan. Pendidikan ideologi diperlukan agar warga negara mampu berpikir kritis terhadap setiap problem sosial yang dihadapi bangsa dalam kehidupan bernegara. Dalam kepenulisan ini, penulis berupaya menterjemahkan dan memodifikasi lebih lanjut upaya penginternalisasian nilai-nilai pancasila untuk membangun kecerdasan berideologi khususnya bagi peserta didik di sekolah. Konteks yang dituju dalam upaya ini adalah lingkungan sekolah sehingga diperlukan revitalisasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi, namun penulis menghindari pengajaran nilai dengan cara-cara yang kaku sehingga penulis menawarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun Kecerdasan Berideologi peserta didik di persekolahan.

## **METODE KEPENULISAN**

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

## **PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara yang majemuk, secara sederhana perbedaan tersebut dapat dikerucutkan menjadi etnisitas dan religiusitas sehingga mempengaruhi cara pandang dan pola pemikiran masing-masing masyarakatnya. Menurut Prof Dasim Budimansyah (2016) kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya dua ciri yang unik, *Pertama* adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal. Ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Negara majemuk seperti indonesia (negara kebangsaan) hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormati. Perbedaan sebagai sebuah realitas sosial hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata dunia jika dikelola dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebhinnekaan rentang menyulut konflik. Realitas sosial selama ini menunjukkan bahwa terdapat gesekan-gesekan di dalam masyarakat yang terjadi akibat kesalahpahaman, stereotip hingga sikap primordialisme yang dapat berujung pada disintegrasi. Namun, sejauh yang dapat dilihat, konflik-konflik vertikal maupun horizontal yang telah terjadi tidak dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia yang beragam telah memiliki satu konsensus nasional yang telah dijunjung tinggi puluhan tahun bahkan telah mengakar dalam kebudayaannya jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945. Konsensus Nasional tersebut adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meninggalkan Pancasila berarti menghancurkan persatuan bangsa. Franz Magnis-Suseno (2009) menyatakan bahwa di Indonesia kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila. Itulah yang mempersatukan warga negara yang berbeda. Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing (Yudi Latif:2016)

Jika dibandingkan dengan ideologi liberalism, komunisme dan fasisme terlihat kelebihan Pancasila yang bersifat sosio kerakyatan namun juga memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada warga negara. Secara kultural, dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya baik tradisional maupun modern, hal inilah yang membuat Pancasila merupakan ciri khas dari Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang multikultural namun dapat hidup damai dan berdampingan. Selain itu, sebagai ideology terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dan tidak kaku dengan perkembangan zaman sehingga dapat terus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, tidak memonopoli kebenaran dan terkesan dipaksakan. Hal ini berbeda misalnya dengan ideologi komunisme. Komunisme sebagai ideologi totaliter menuntut sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup yang mencakup sepenuhnya seluruh kehidupan manusia. Ideologi komunis memberikan gambaran masyarakat yang harus dicapai serta sarana yang perlu disediakan. Perbedaan pendapat mengenai ilmu tidak dipecahkan melalui penelitian ilmiah melainkan ditentukan dalam perdebatan ideologis dimana Komite Sentral Partai Komunis memberikan keputusan yang definitif (Soerjono Soekanto:1989). Perbandingan lain juga dapat ditunjukkan pada ideologi liberalisme. Ideologi liberal menekankan kebebasan individu sehingga mengembangkan sikap individual. Liberalisme cenderung mempertahankan *status quo* dan kurang tanggap terhadap masalah-masalah sosial internal maupun konteks global (negara-negara berkembang) dalam hal pemerataan kesejahteraan keadilan.

Masyarakat yang individualis bukanlah cerminan dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia dikenal sebagai pribadi yang hangat, suka bekerjasama sehingga terbentuk prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sedangkan, jika dibandingkan lagi dengan ideologi fasisme, maka akan terlihat perbedaan yang jelas karena ideologi Pancasila tidak mengkultuskan pemimpin dan mengancam kebhinnekaan. Pernyataan ini bahkan terbukti dari ucapan dan tindakan Bung Karno yang menyatakan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila melainkan hanya menggali ke dasar kehidupan masyarakat Indonesia dan menemukan mutiara-mutiara berupa sila-sila Pancasila.

Berdasarkan pernyataan para ahli dan eksplorasi di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mutlak harus dipahami dan nilai-nilai Pancasila harus terinternalisasi di dalam diri setiap warga negara. Sebagai ideology negara memberikan orientasi dan wawasan, asas dan pedoman yang normative serta dituangkan dalam seluruh bidang kehidupan negara baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hankam. Dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, sebagai ideologi negara, Pancasila tidak boleh diajarkan secara indoktrinatif sebab Pancasila bukanlah sebuah ideologi tertutup, yang memutlakkan kebenaran dan menutup pintu

untuk didiskusikan bahkan pancasila membuka diri untuk setiap perubahan dan cara-cara kreatif untuk pengimplementasiannya. Pancasila bukanlah ideologi yang mengatur secara rinci setiap aspek kehidupan masyarakat, ia hanya memberikan rambu-rambu berupa nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan.

Pancasila merupakan substansi utama yang diajarkan dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah (PPKn). PPKn ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Prof Numan somantri (2001) melukiskan warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap cita negara, Beragama, demokratis, pancasilais. Untuk membentuknya diperlukan jalur pendidikan dan diajarkan dengan cara-cara yang edukatif (M.Fachri Adnan, 2005).

PPKn adalah bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/ multidimensional. Menurut Prof Udin Winataputra (2001) sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki bidang kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban. Prof Numan Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi *civics* dan *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakekatnya objek kajian PKn adalah perilaku warga negara (Prof Sapriya,2007). Ontologi PKn yang essensial adalah perilaku warga negara. Dilihat dari fenomena PKn sebagai kajian perilaku warga negara maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normative, antropologis dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional. PPKn merupakan sarana untuk memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila kepada peserta didik. Namun, kelemahan yang terjadi pada praktinya, adalah PPKn relatif sering diajarkan melalui metode konvensional seperti ceramah dan diskusi. Tidak dapat dikatakan bahwa kedua hal ini merupakan cara yang buruk namun sebaiknya perlu disusun sebuah strategi dan metode yang lebih komunikatif, menyenangkan dan jauh dari kesan indoktrinatif.

Pendekatan pendidikan untuk mengajarkan pancasila kepada warga negara diperlukan sehingga urgensi pendidikan ideology penting diberikan di sekolah. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology tidak hanya dilakukan dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn kerjasama dengan guru agama serta warga sekolah lainnya. Dalam permendikbud yang mengatur teknis pelaksanaan kurikulum 2013, terdapat 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam standar proses, ditentukan bahwa sikap spiritual siswa menjadi tanggung jawab guru agama dan budi pekerti sedangkan untuk sikap sosial ditujukan pada guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini jelas berbeda dari kurikulum 2006 (KTSP) dimana penilaian sikap peserta didik dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran. Untuk penyederhanaan mekanisme penilaian, memang hal ini menjadi lebih efektif karena mata pelajaran agama dan budi pekerti serta PPKn merupakan mata pelajaran wajib untuk tiap tingkatan kelas sehingga guru pada masing-masing bidang studi tersebut memiliki keleluasaan dalam penilaian sikap. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek

spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Aturan diatas tidak menutup kemungkinan majelis guru bidang studi untuk membina karakter peserta didik. oleh sebab itu, kerjasama dan dukungan penting untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk watak dan karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual, intelektual, sosial, mental dan emosional.

Kegiatan ekstrakurikuler ini sebaiknya dilakukan di jenjang SMA/SMK/MA sebab peserta didik dalam tataran ini telah cukup diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman awal yang baik mengenai pancasila. Peserta didik dituntut mengembangkan apa yang telah dipelajari dari sumber yang diberikan guru maupun sumber yang dicari secara mandiri setelah itu mampu merefleksikannya, outputnya diharapkan pada aplikasi nilai-nilai pancasila melalui kesadaran sendiri. Ekskul ini dinamakan “cerdas berideologi”. Ekskul ini dapat dijadikan sebagai mode pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada nilai sila-sila pancasila dan dijadikan sebagai kegiatan inti untuk melatih, mempersiapkan dan memberi pembekalan kepada setiap peserta didik yang berminat aktif dalam semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum mereka aktif dan terjun dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti paskibraka, pramuka, PMR atau ROHIS, mereka harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan kepemimpinan jiwa pancasila terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memantapkan jiwa kepemimpinan berdasar kepada sila pancasila sehingga nantinya dalam ekskul peminatan masing-masing mampu menerapkan apa yang mereka dapat di kegiatan ekskul cerdas berideologi. Diharapkan akan lahir para pribadi yang bertanggung jawab dan cerdas berideologi di bidangnya masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan seputar pancasila mulai dari tataran teoritis – seperti sejarah, makna sila pancasila, filsafat pancasila—hingga aktualisasi sila-sila pancasila dalam tataran praktis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan pergaulan dunia internasional. Warga negara tidak hanya dipersiapkan untuk cerdas berinteraksi dalam konteks keindonesiaan tetapi juga perlu dibina untuk menjadi warga negara global. Tataran teoritis dapat dijabarkan dengan membuat sebuah modul yang berintikan persoalan seputar pancasila namun harus digarisbawahi bahwa konten yang terdapat di dalamnya harus terlepas dari kepentingan politik jangka pendek pihak-pihak tertentu tetapi murni ditujukan pada masa depan pemahaman peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas sebagai penerus cita-cita bangsa untuk lima atau 10 tahun kedepan. Modul sebaiknya juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang memperkuat pemaknaan sila-sila pancasila, hal ini merupakan suatu bentuk hidden curriculum. Modul disusun oleh MGMP PKn SMA/SMK/MA sebagai perkumpulan guru bidang studi mata pelajaran di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar terdapat penyeragaman materi ekskul cerdas berideologi yang dijalankan sekaligus memberdayakan peran keberadaan MGMP PPKn.

Penekanan pada tataran teoritis dapat secara bersamaan dilakukan dengan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas sebab dalam kurikulum 2013 untuk tingkatan SMA/SMK/MA cukup banyak memuat materi seputar pancasila, ditambah lagi dengan pengetahuan awal peserta didik ketika mempelajarinya di SMP/MTs. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, yang perlu ditekankan adalah aplikasi dari pengetahuan dan pemahaman terhadap sila-sila pancasila. Kegiatan ini sebaiknya dikoordinasi oleh guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebab (1) pancasila merupakan esensi utama dalam pendidikan kewarganegaraan;(2)mengacu kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni mempersiapkan warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*), warga negara yang cerdas adalah warga negara yang memahami dan menghayati ideology negaranya, melalui refleksi dalam dirinya, ia akan mampu menerapkan nilai-nilai ideology tersebut dengan kesadaran bukan dengan paksaan. Menerapkan ideology dengan paksaan hanya menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan

yang bersifat semu dan sementara sembari kekuatan pemaksa tersebut eksis, ketika daya paksa telah lemah maka gejala ketidakpuasan yang berujung pemberontakan atau chaos akan muncul ke permukaan seperti bisul yang menyembul karena sudah sejak lama menyentak di dalam namun belum menemukan cara untuk keluar. Keadaan ini sama-sama memunculkan kerugian baik bagi warga negara maupun bagi negara.

Ekskul cerdas berideologi tidak dimaksudkan memaksa peserta didik untuk mempelajari ideology negara dengan cara-cara indoktrinatif justru sebaliknya diajarkan dengan cara-cara yang edukatif dan menyenangkan. Ideology tentu berisi tentang cita dan kebajikan. Ideology pancasila berisi tentang cita masyarakat dan negara yang didambakan serta nilai-nilai kebajikan pancasila yang diharapkan dapat terealisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kebajikan harus diajarkan lewat proses pembudayaan dan habituasi/pembiasaan sejak dini. Kebajikan tidak bisa diajarkan lewat teori, ceramah dan cara-cara yang simbolik dan hanya berkisar di dalam kelas. Dalam kurikulum 2013, salah satu aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses, dinyatakan pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Oleh karena itu, ekskul cerdas berideologi didesain bukan dengan kegiatan pembelajaran kaku di dalam kelas melalui metode-metode ceramah. Ekskul ini dapat dilakukan di alam terbuka apakah di area lapangan sekolah, taman sekolah atau area lingkungan sekitar sekolah.

Kegiatan ini sebaiknya tidak dilakukan secara massal, dalam artian pelatihan diberikan secara berkelompok, bergelombang dan berkala sehingga guru Pembina dapat intens berkomunikasi, bersosialisasi berdialog/berdiskusi dengan para peserta didik. kegiatan ekskul dapat menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar sekolah, pejabat birokrat atau akademisi di lingkungan sekolah, guru-guru bahkan kepala sekolah dapat menjadi narasumber. Mendeskripsikan pengalaman keberhasilan, semangat, contoh aplikatif pengamalan sila pancasila dalam kehidupannya dan seruan untuk belajar giat dan dengan peminatannya masing-masing. Kecerdasan berideologi diperlukan dalam semua bidang kehidupan karena pancasila sebagai ideology negara telah dijabarkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hankam sehingga harus dipelihara dan dipertahankan demi cita dan kebajikan yang diharapkan.

Kegiatan ekskul cerdas berideologi sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena mengandung beberapa kelebihan bagi peserta didik maupun warga sekolah lainnya yakni (1) menanamkan dan membina jiwa kepemimpinan berdasar sila pancasila pada para peserta didik sejak dini sehingga pengetahuan dan pemahaman awal seputar pancasila tidak hanya berkisar di tataran teoritis tapi juga merambah pada tataran praktis dengan adanya kegiatan ekskul cerdas berideologi; (2) menghindari cara-cara indoktrinatif dalam mengajarkan ideology kepada generasi muda tetapi disampaikan dengan cara-cara yang edukatif, motivatif, kreatif dan menyenangkan; (3) menanamkan spirit kebangsaan untuk menumbuhkan semangat belajar dan berkarya kepada para peserta didik sesuai dengan peminatannya masing-masing; (4) mempererat hubungan semua warga sekolah karena terlibat dan ikut dalam kegiatan ekskul cerdas berideologi.

Kurikulum bukanlah kumpulan pembelajaran. Kurikulum merupakan program pembelajaran yang memuat kumpulan mata pelajaran, pembiasaan tingkah laku, kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial seperti bakti sosial pelajar, bazaar dan pelatihan-pelatihan. Kesemua kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Mengembangkan potensi yang mereka miliki, bukan mendominasi sehingga mematikan kreatifitas dan potensi tersebut. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 4 ayat (4) UU No.20/2003). Guru berfungsi sebagai fasilitator yang

memberikan bimbingan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang serta membina karakter peserta didik. Sisi akademik dan karakter harus berjalan secara seimbang sebab jikalau hanya cerdas secara akademik akan membuat mereka menjadi pribadi yang pragmatis. Banyak contoh yang dapat kita lihat dari sisi ini, pejabat negara yang menjadi koruptor merupakan orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi tetapi lemah dalam karakter sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab akademik dan moral untuk membina sisi akademik dan karakter peserta didik agar nantinya dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu membangun peradaban sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yakni Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif.

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempercepat terjadinya mobilisasi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan jarak antar negara tanpa sekat. Terdapat banyak keuntungan jika mampu memanfaatkan era digital seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi namun juga terkandung eksese-eksese negative di dalamnya seperti kejahatan *cyber* yang bersifat lintas negara serta persaingan di bidang ekonomi yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, peran pendidikan kewarganegaraan cukup strategis dalam mempersiapkan warga negara global. Dalam konteks globalisasi, pendidikan berperan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan internasional. Salah satu potensi signifikansi pendidikan terhadap dunia masa depan yaitu pendidikan merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia sehingga berkembang dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok (kokom Komalasari dan Syaifullah:2009). Kompleksitas permasalahan di era globalisasi baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, politik menuntut pengetahuan dan pemahaman bagi warga negara agar tidak hanya menjadi objek. Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.

## **KESIMPULAN**

Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno (2009) Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Secara historisitas, Nilai-nilai Pancasila mampu menyatukan semua kebhinnekaan menjadi persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Namun, disadari atau tidak, diakui atau tidak pengamalan nilai-nilai Pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan, diperlukan langkah kongkret untuk membina dan meningkatkan kecerdasan berideologi warga negara terutama peserta didik sebagai generais penerus bangsa. Pendekatan pendidikan untuk kecerdasan berideologi diperlukan untuk menghindari unsure-unsur indoktrinatif. Revitalisasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan ideologi di sekolah merupakan sebuah upaya menuju kearah terwujudnya warga negara yang baik, cerdas, kritis, bertanggung jawab dan teguh berideologi. Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.

**Daftar Pustaka**

- Adnan, M.Fachri Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Demokratisasi. Jurnal demokrasi Vol. IV No.1/2005.
- Al Muchtar, Suwarma. 2016. Ideology Pancasila: Kajian Filsafat Teori Politik Dan Pendidikan. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- \_\_\_\_\_.2014.filsafat hukum: kearah memperkuat pemikiran system hukum pancasila. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- \_\_\_\_\_.2016. “*civic education revitalization as educational ideology of pancasila and the implication for teaching education system*”. Prosiding international seminar:pendidikan kewaganegaraan sebagai bidang keilmuan dan program pendidikan dalam konteks penguatan daya saing lulusan, Bandung, universitas pendidikan indonesia, 15-16 November 2016.
- Budimansyah, Dasim (Ed). 2016. Teori sosial dan kewarganegaraan. Bandung: Widia Aksara Press.
- Komalasari, Kokom dan Syaifullah. 2009. Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, Perkembangan Dan Masalah Kontemporer. Bandung: Laboratorium UPI.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasional, Dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseso, Franz. 2009. Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan. Jakarta: Kanisius.
- Notonagoro. 1983. Pancasila Secara Ilmiah Popular. Jakarta: Bina Aksara.
- Oesman, Oetojo dan Alfian (Ed) .1992.pancasila sebagai ideologi: dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Permendikbud No.22 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Poespowardojo, Soejanto. 1989. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Azis dan Sapriya.2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta.